



# **PENGARUH REALISASI PENDAPATAN DAN REALISASI INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI REALISASI BELANJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

Rafifah Ramadhania <sup>1\*</sup>, Ninik Kurniasih <sup>2</sup>, Qisthi Ardhi <sup>3</sup>

Politeknik Negeri Pontianak

\* email penulis korespondensi: rafifah4o6@gmail.com

## **Abstract**

**Purpose** – This study aims to determine the effect of revenue realization and investment realization on economic growth through expenditure realization in Regencies/Cities in West Kalimantan Province.

**Method** – The type of data used is panel data. In this study, the path analysis test was used which was processed with a statistical tool, namely SPSS 26 software.

**Result** – The results of this study indicate that revenue realization and investment realization have a positive effect on expenditure realization. Furthermore, revenue realization and realized expenditure had no effect on economic growth. However, investment realization has a positive effect on economic growth. The expenditure realization as an intervening variable cannot increase economic growth.

**Implication** – It is hoped that the government can manage revenues and expenditures properly and effectively in order to increase economic growth in a sustainable manner which in turn can prosper the community. The government must also allocate public funds for productive projects and prioritize the needs of urgent communities so that economic growth can be maintained stably in the following years.

**Originality** – This research is the first study that used expenditure realization as variable intervening.

**Keywords:** Revenue Realization; Investment Realization; Expenditure Realization; Economic Growth.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Salah satu cara untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di wilayah tersebut. Todaro (1997) dalam Kurniawan et al (2017) menyebutkan bahwa pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan besar di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Menurut Mangkoesobroto (1998) dalam Raharjo (2006) peran pemerintah yang harus dijalankan, pertama adalah peran alokasi, yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang tidak diproduksi oleh pihak swasta. Kedua, peranan distribusi dengan cara melalui kebijakan fiskal merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi yang mampu dan mendistribusikan bagi yang kurang mampu. Serta peranan stabilisasi, yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan.

Kalimantan Barat menempati posisi ketiga dalam distribusi PDRB setelah Jawa Timur dan Kalimantan Timur yang menempati posisi pertama dan kedua. Di tengah tertahannya perbaikan ekonomi nasional pada tahun 2021, Kalimantan Barat memiliki rata-rata distribusi PDRB dari tahun 2017 hingga 2021 sebesar 13,11% (BPS, 2022). Angka tersebut cukup besar untuk sebuah provinsi yang berada cukup jauh dari ibu kota. Salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat dapat dilihat dalam bentuk peningkatan belanja daerah. Belanja daerah merupakan salah satu komponen dalam pengeluaran pemerintah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah semakin diperkuat. Dalam hal ini, belanja daerah menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan daerah merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Semakin besar pendapatan daerah, maka berbanding lurus dengan realisasi belanja daerah yang dilakukan. Jika pendapatan suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja juga akan mengalami suatu peningkatan diantaranya pembangunan infrastruktur untuk publik.

Investasi daerah juga memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Investasi daerah dapat membantu meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, investasi daerah juga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai jenis pajak dan retribusi yang dikenakan pada kegiatan investasi tersebut. Oleh karena itu, analisis

mengenai pengaruh pendapatan dan investasi daerah terhadap belanja daerah dapat memberikan informasi mengenai seberapa besar kontribusi investasi daerah dalam pengembangan ekonomi daerah melalui belanja daerah.

Teori fiskal yang dinyatakan oleh Keynes dalam karya yang berjudul “The General Theory of Employment, Interest, and Money” menyatakan bahwa realisasi belanja pemerintah dipengaruhi oleh realisasi pendapatan pemerintah (Fitria et al, 16 2023). Menurut teori fiskal, realisasi belanja pemerintah cenderung dipengaruhi oleh realisasi pendapatan pemerintah. Ketika pemerintah memiliki pendapatan yang lebih besar, misalnya melalui penerimaan pajak yang meningkat atau penghasilan dari sumber-sumber lainnya, maka pemerintah memiliki kemampuan dan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan belanja yang lebih besar juga. Keynes dalam teori fiskal tersebut juga mengemukakan bahwa investasi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengeluaran agregat dan dapat mempengaruhi realisasi belanja pemerintah. Keynes berpendapat bahwa dalam situasi ketika ekonomi mengalami depresi atau kurangnya pengeluaran swasta, pemerintah dapat mengambil peran dengan meningkatkan investasi publik (Prastomo, 2017).

Teori Decentralized Development atau Pembangunan Terdesentralisasi mengemukakan bahwa ketika pendapatan daerah diarahkan dan digunakan secara efektif untuk pembangunan lokal, hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara positif (Azzumar et al, 2011). Teori ini berargumen bahwa ketika pendapatan daerah meningkat melalui berbagai sumber seperti pajak, royalti, dan dana transfer, pemerintah daerah memiliki dana yang lebih besar untuk menginvestasikan dalam pembangunan infrastruktur, sektor produktif, dan layanan publik. Teori pertumbuhan ekonomi endogen (Priyambodo, 1995) dalam (Maharani et al, 2014) mengemukakan bahwa investasi memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen, investasi dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan akumulasi modal dan teknologi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kemakmuran ekonomi.

Hukum Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, belanja daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan konsumsi pemerintah, investasi, dan pengeluaran masyarakat. Belanja daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Solikin, 2018).

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui pengaruh realisasi pendapatan dan realisasi investasi terhadap realisasi belanja serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini perumusan hipotesis dari penelitian ini:

- H<sub>1</sub> : Realisasi pendapatan berpengaruh positif terhadap realisasi belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- H<sub>2</sub> : Realisasi investasi berpengaruh positif terhadap realisasi belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- H<sub>3</sub> : Realisasi pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- H<sub>4</sub> : Realisasi investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- H<sub>5</sub> : Realisasi belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- H<sub>6</sub> : Realisasi pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui realisasi belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- H<sub>7</sub> : Realisasi investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui realisasi belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dalam penelitian ini ialah penelitian asosiatif (*Assosiative Research*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan mengetahui hubungan dan kaitan antara suatu variabel atau lebih dengan variabel lainnya, yang kemudian dapat dibangun sebuah teori yang dapat memprediksi, menjelaskan, dan mengontrol bagaimana suatu gejala dari model dapat terjadi.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah jenis data sekunder. Data yang digunakan ialah gabungan dari data silang (*Cross Section*) dan data deret waktu (*Time Series*) menjadi data panel. Sumber data sendiri bersumber pada website BPS Kalbar. Data yang penulis ambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah data panel dari data 12 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017<sup>32</sup> hingga tahun 2021 dengan total sampel sebagai bahan observasi sebanyak 70 sehingga diharapkan dapat merepresentasikan populasi dari model tersebut.

### **Variabel Penelitian**

#### **Realisasi Pendapatan**

Realisasi pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang sebenarnya telah diterima oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini realisasi pendapatan terdiri atas PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/SDA, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang sah

### **Realisasi Investasi**

Realisasi investasi merupakan implementasi program investasi yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini realisasi investasi juga terdiri atas realisasi investasi proyek PMDN dan PMA.

### **Realisasi Belanja**

Realisasi belanja merupakan implementasi pengeluaran anggaran pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Realisasi belanja pemerintah meliputi belanja rutin dan belanja modal.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan tingkat pertumbuhan tahunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB menurut harga konstan tahun 2010.

### **Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji model dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian ini, maka digunakan aplikasi SPSS 26. Untuk menganalisis data yang ada, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, mulai dari uji asumsi klasik sebagai uji prasyarat yang bertujuan untuk mengetahui gejala pada data yang digunakan. Selanjutnya dilakukan uji analisis jalur untuk menganalisis pola hubungan antar variabel

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi suatu variabel bebas dan terikat atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang dianggap baik jika memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2017). Uji statistik yang digunakan untuk menilai normalitas dalam penelitian ini adalah melalui metode grafik. Metode grafik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat normal probability plot. Dasar pengambilan keputusan melalui analisis ini, jika data menyebar disekitar garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

##### **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2017). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Sebab jika terdapat korelasi antar variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Sebuah model tidak terdapat multikolinieritas dengan syarat nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai VIF < 10,00.

##### **Uji Heterokedastisitas**

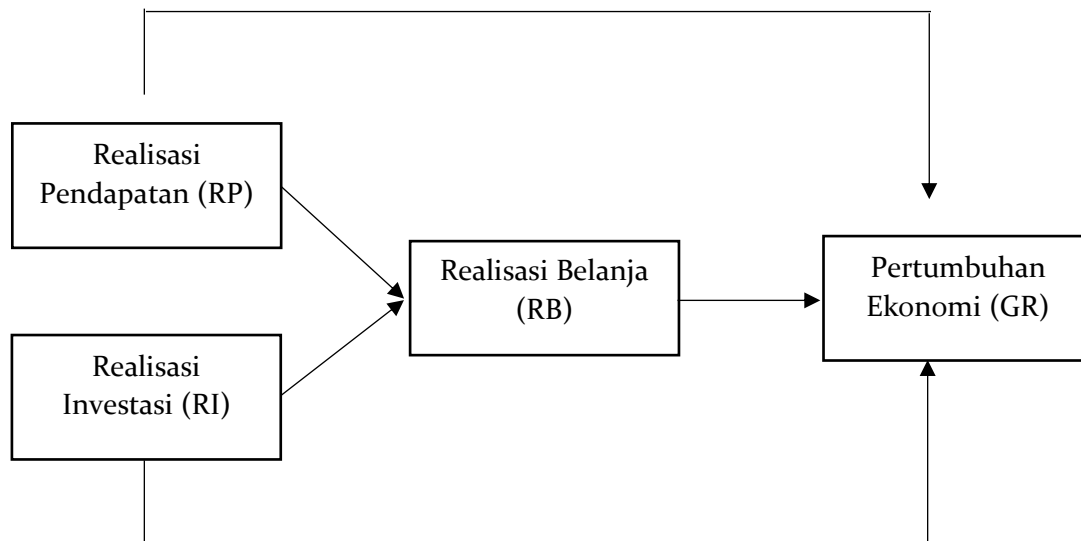
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain (Ghozali, 2017). Model regresi yang dianggap baik adalah yang memiliki residual antara satu pengamatan ke pengamatan lain yang konstan atau homokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heterokedastisitas dapat dilihat dari Grafik Scatterplot

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2017). Ukuran dalam menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan nilai DW harus berada diantara  $-2$  dan  $2$ .

### Uji Analisis Jalur

Analisis jalur merupakan suatu metode penelitian yang merupakan aplikasi dari analisis regresi berganda dalam menguji kekuatan dari hubungan langsung dan tidak langsung diantara berbagai variabel (Kerlinger, 2004). Dalam penelitian ini, hubungan diantara variabel bebas dengan variabel terikat yang dimediasi oleh variabel intervening dapat digambarkan dalam model persamaan path analysis sebagai berikut:



$$\text{Model I } RB_{it} = p_1 RP_{it} + p_2 RI_{it} + e_{1it}$$

$$\text{Model II } GR_{it} = p_3 RP_{it} + p_4 RI_{it} + p_5 RB_{it} + e_{2it}$$

Setelah membentuk model dari analisis jalur, tahapan selanjutnya yaitu menghitung besaran dari nilai error dari model yang telah dibentuk. Nilai error pada model analysis path perlu dicantumkan sehingga nilainya perlu dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus error } e = \sqrt{1 - R^2}$$

Pengaruh tidak langsung dapat diperoleh dengan cara mengalikan nilai jalur atau koefisien kalur pada setiap hubungan tidak langsung. Pengujian hipotesis pengaruh mediasi dapat diketahui dengan melakukan pengujian sobel. Uji sobel digunakan untuk menguji apakah variabel intervening berpengaruh signifikan atau tidak dalam model path analysis. Cara menguji uji sobel dihitung dengan cara mengalirkan jalur. Kemudian dihitung dengan rumus:

$$\text{Rumus Jalur 1, } sa1b = \sqrt{b^2sa1^2 + a1^2sb^2 + sa1^2sb^2}$$

$$\text{Rumus Jalur 2, } saz2b = \sqrt{b^2sa2^2 + a2^2sb^2 + sa2^2sb^2}$$

Untuk menguji signifikansi dari pengaruh tidak langsung, maka perlu dilakukan perhitungan untuk mengukur p-value dengan menggunakan rumus berikut, yaitu:

$$\text{Rumus Jalur 1, } p\text{-value} = \frac{a1b}{sa1b}$$

$$\text{Rumus Jalur 2, } p\text{-value} = \frac{a2b}{sa2b}$$

Jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi atau intervening memiliki pengaruh variabel intervening pada model.

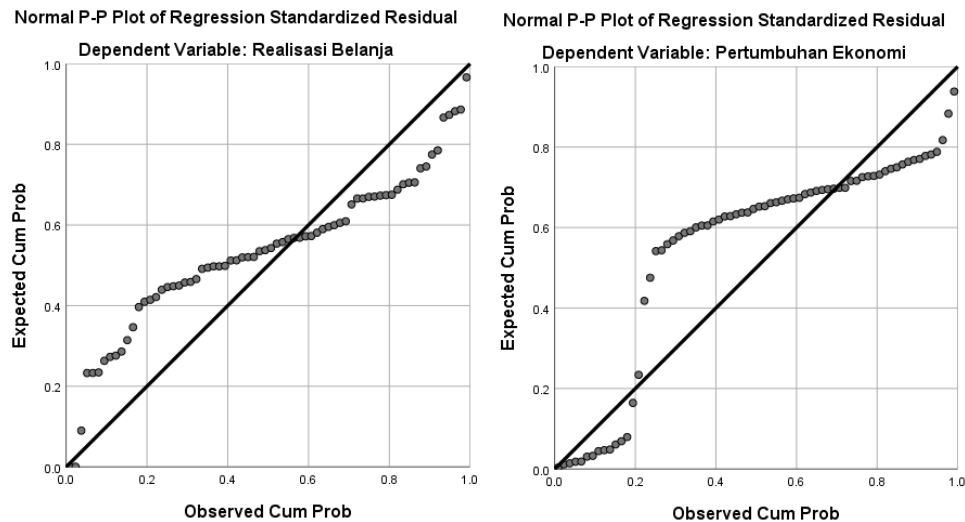
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah secara terstruktur dan berdasarkan urutan proses statistik maka sebelum diuji analisis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Pada penelitian ini terdapat 2 model persamaan. Model I merupakan model persamaan dengan realisasi pendapatan dan realisasi investasi sebagai variabel independen serta realisasi belanja sebagai variabel dependen. Kemudian model II adalah model persamaan dimana realisasi pendapatan, realisasi investasi, dan realisasi belanja sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda, pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Berdasarkan pada Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa data pada model baik model I maupun model II penelitian ini terdistribusi secara normal. Hal tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya garis imajiner hasil dari titik/ploting yang beriringan mengikuti garis secara diagonal (Ghozali, 2017).



**Gambar 1.** Hasil Uji Normalitas

#### Uji Multikolineritas

Berdasarkan dari hasil uji multikolineritas menunjukkan bahwa setiap variabel bebas baik pada model I maupun model II memiliki nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai VIF < 10,00. Dengan demikian, persamaan pada model I dan model II terbebas dari gejala multikolineritas atau tidak terdapat korelasi antar variabel bebas pada setiap model. Artinya pada model I dan model II tidak terdapat korelasi antar variabel bebas.

**Tabel 1.** Hasil Uji Multikolineritas

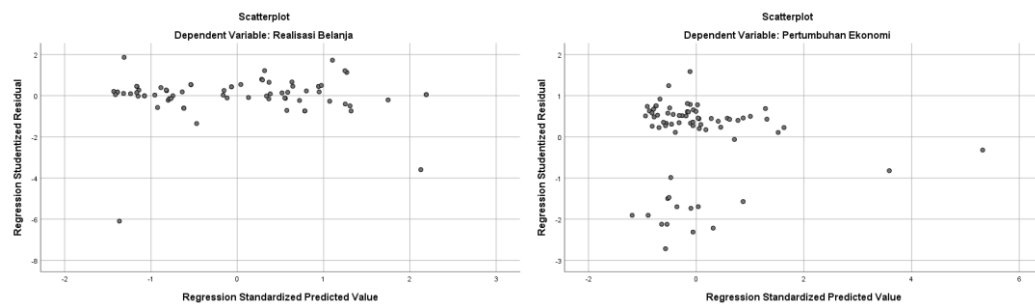
Model	Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kriteria Bebas Multikolineritas
Model I	Realisasi Pendapatan	0,970	1,031	<i>Tolerance</i> > 0,10 VIF < 10,00
	Realisasi Investasi	0,970	1,031	
Model II	Realisasi Pendapatan	0,703	6,275	
	Realisasi Investasi	0,900	1,111	
	Realisasi Belanja	0,680	8,683	

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 26



### Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dapat dijelaskan dengan hasil analisis grafik yaitu grafik *scatterplot*. Kriteria pada uji heterokedastisitas adalah jika titik-titik tersebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maka model terbebas dari gejala heterokedastisitas. Pada gambar dapat dilihat dapat dilihat pada model I dan model II titik-titik tersebar sesuai dengan kriteria, sehingga kedua model tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain / homokedastisitas.



**Gambar 2.** Grafik *Scatterplot*

### Uji Autokorelasi

Untuk melihat apakah terdapat gejala autokorelasi maka dapat dilihat dari nilai *durbin-watson*. Kriteria untuk terbebas dari gejala autokorelasi adalah nilai *durbin-watson* harus lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari 2. Dengan nilai DW model I dan model II masing-masing sebesar 1,607 dan 1,592 dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada kedua model.

**Tabel 2.** Hasil *Durbin-Watson*

Model	<i>Durbin-Watson</i>
Model I	1,607
Model II	1,592

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

### Uji Analisis Jalur

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada kedua model menggunakan SPSS 26, didapat hasil perhitungan tabel di bawah:

**Tabel 3.** Hasil Pengaruh Langsung Model I

Model	<i>STDb</i>	<i>t Hitung</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keterangan</i>
RP → RB	0,950	29,332	0,000	Berpengaruh
RI → RB	0,074	2,282	0,026	Berpengaruh

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan hasil estimasi regresi pada Tabel 3 dapat diperoleh koefisien realisasi pendapatan pada model I sebesar 0,950 yang artinya ketika realisasi pendapatan meningkat sebesar 1 ribu maka realisasi belanja juga meningkat sebesar 0,950 ribu. Begitu juga dengan realisasi investasi memiliki koefisien sebesar 0,074 yang berarti setiap kenaikan realisasi investasi 1 ribu rupiah maka realisasi belanja juga akan meningkat sebesar 0,074 ribu rupiah. Sehingga dengan penjelasan tersebut didapat persamaan model pertama sebagai berikut:

$$RB_{it} = 0,950RP_{it} + 0,074RI_{it} + e_{1it}$$

Dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel realisasi pendapatan sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 dan nilai  $T_{hitung}$  adalah 29,332 lebih besar dari  $T_{tabel}$  yaitu 1,996. Yang berarti bahwa realisasi pendapatan berpengaruh terhadap realisasi belanja. Kemudian, variabel realisasi investasi memiliki nilai signifikansi 0,026 yang mana lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 serta memiliki nilai  $T_{hitung}$  sebesar 2,282 lebih besar dari  $T_{tabel}$  yaitu 1,996. Sehingga realisasi investasi berpengaruh terhadap realisasi belanja.

Untuk mengetahui nilai error pada model I dapat diketahui adanya nilai  $R^2$  sebesar 0,930 sehingga dapat dihitung besarnya nilai pada model I sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Error I } (e_i) &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,930} \\ &= \sqrt{0,07} \\ &= 0,27 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel realisasi pendapatan dan realisasi investasi berpengaruh sebesar 0,930 terhadap realisasi belanja. Sedangkan sisanya sebesar 0,27 merupakan pengaruh variabel lain diluar variabel realisasi pendapatan dan realisasi investasi yang tidak termasuk dalam model ini

**Tabel 4.** Hasil Pengaruh Langsung Model II

Model	<i>STDb</i>	<i>t Hitung</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keterangan</i>
RP → GR	0,150	0,336	0,738	Tidak Berpengaruh
RI → GR	0,283	2,264	0,027	Berpengaruh
RB → GR	-0,270	-0,594	0,554	Tidak Berpengaruh

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan hasil estimasi regresi pada tabel 4 dapat diperoleh koefisien realisasi pendapatan pada model II sebesar 0,150 yang berarti setiap kenaikan realisasi pendapatan sebesar 1 ribu rupiah maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 0,15%. Pada realisasi investasi koefisien yang dimiliki sebesar 0,283 sehingga setiap kenaikan realisasi investasi sebesar 1 ribu rupiah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,283%. Sedangkan pada realisasi belanja koefisien yang dimiliki adalah -0,270 yang berarti setiap kenaikan realisasi belanja sebesar 1 ribu rupiah maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,27%. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan perasmaan model kedua sebagai berikut:

$$GR = 0,150RP_{it} + 0,283RI_{it} - 0,270RB_{it} + e_{2it}$$

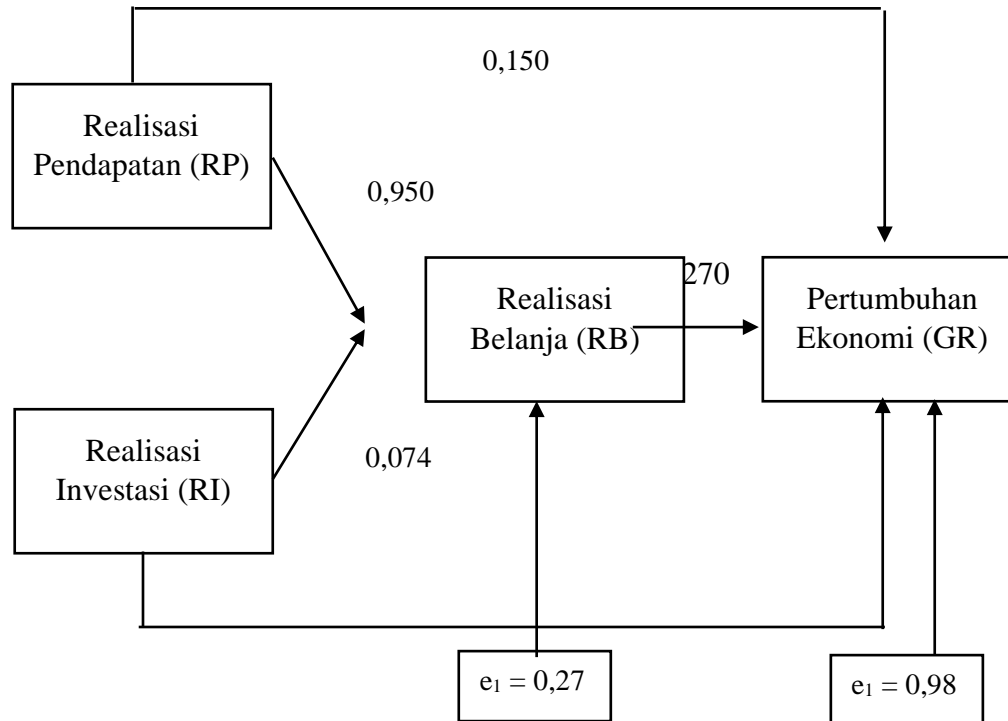
Dari hasil estimasi regresi pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi dari ketiga variabel pada model kedua tersebut memiliki nilai yang berbeda. Pada variabel RP yaitu realisasi pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,738 yang mana lebih besar daripada  $\alpha$  yaitu sebesar 0,05 dan nilai Thitung sebesar 0,336 lebih kecil daripada nilai Ttabel sebesar 1,996 sehingga realisasi pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Nilai signifikansi pada variabel RI atau realisasi investasi adalah sebesar 0,027 lebih kecil daripada  $\alpha$  yaitu sebesar 0,05 serta nilai Thitung sebesar 2,264 lebih besar daripada nilai Ttabel sebesar 1,996 sehingga variabel RI tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang terakhir variabel RB yaitu realisasi belanja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,554 yang lebih besar dibandingkan  $\alpha$  sebesar 0,05 serta nilai Thitung sebesar 2,264 lebih besar daripada nilai Ttabel sebesar 1,996 yang berarti bahwa variabel RB tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mengetahui besaran nilai error pada model kedua ini, dapat diketahui dengan menghitung dari besaran  $R^2$  pada model kedua 0,033, sehingga dapat dihitung besarnya nilai error pada model kedua sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Error II } (e_2) &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,033} \\ &= \sqrt{0,967} \\ &= 0,98 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel realisasi pendapatan, realisasi investasi, dan realisasi belanja berpengaruh sebesar 0,033 terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya sebesar 0,98 merupakan pengaruh variabel lain di luar variabel realisasi pendapatan, realisasi investasi, dan realisasi belanja yang tidak termasuk dalam model ini. Dari hasil regresi kedua model di atas, diketahui bahwa

nilai dari setiap jalur dan dapat dibentuk kerangka analisis jalur (path analysis) dari tiap-tiap model sebagai berikut:



**Gambar 3.** Hasil Analisis Jalur

Berdasarkan model *path analysis* yang telah dibuat dapat dirumuskan bahwa besaran nilai pengaruh tidak langsung dari tiap-tiap jalurnya dari model tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh tidak langsung realisasi pendapatan (RP → GR)

$$\begin{aligned} \text{RP} \rightarrow \text{GR} &= P_1 \times P_5 \\ &= (0,950) \times (-0,270) \\ &= -0,257 \end{aligned}$$

- b. Pengaruh tidak langsung realisasi investasi (RI → GR)

$$\begin{aligned} \text{RI} \rightarrow \text{GR} &= P_2 \times P_5 \\ &= (0,074) \times (-0,270) \\ &= -0,020 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung dari variabel RP atau realisasi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai sebesar  $-0,256$ , artinya ada indikasi pengaruh negatif secara tidak langsung realisasi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui realisasi belanja sebagai variabel intervening sebesar  $0,257$ . Pengaruh tidak langsung dari RI atau realisasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar  $-0,020$ , artinya terdapat indikasi pengaruh negatif secara tidak langsung variabel realisasi investasi terhadap variabel pertumbuhan ekonomi melalui realisasi belanja sebagai variabel intervening sebesar  $0,02$ .

**Tabel 5.** *Unstandardized Coefficients*

Pengaruh Antar Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Standard Error
RP → GR	$9,302 \times 10^{-10}$	0,071
RI → GR	$1,249 \times 10^{-10}$	0,004
RB → GR	$-1,598 \times 10^{-9}$	0,052

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Untuk menentukan tingkat signifikansi daripada hubungan tidak langsung antar variabel tersebut, maka dibentuklah dua jalur pengaruh hubungan yang dimediasi oleh variabel intervening yaitu realisasi belanja. Adapun kedua jalur tersebut adalah jalur pertama yang merupakan jalur pengaruh tidak langsung variabel realisasi pendapatan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yang dilakukan mediasi melalui variabel realisasi belanja dan yang kedua adalah jalur pengaruh tidak langsung variabel realisasi investasi terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yang dilakukan mediasi melalui variabel realisasi belanja. Oleh karena itu, untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh tidak langsung dari tiap-tiap jalur pada kedua variabel bebas tersebut maka dilakukanlah Uji Sobel berikut:

a. Uji Sobel Jalur Pertama

$$sa1b = \sqrt{b^2 sa1^2 + a1^2 sb^2 + sa1^2 sb^2}$$

=

$$\sqrt{(-1,598 \times 10^{-9})^2 (0,071)^2 + (9,302 \times 10^{-10})^2 (0,052)^2 + (0,071)^2 (0,052)^2}$$

$$= 0,0037$$

$$\begin{aligned}
 p\text{-value} &= \frac{a1b}{sa1b} \\
 &= \frac{(9,302 \times 10^{-10}) \times (-1,598 \times 10^{-9})}{0,0037} \\
 &= -3,99483 \times 10^{-16}
 \end{aligned}$$

a. Uji Sobel Jalur Kedua

$$\begin{aligned}
 saz_b &= \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2} \\
 &= \\
 &= \sqrt{(-1,598 \times 10^{-9})^2(0,004)^2 + (1,249 \times 10^{-10})^2(0,052)^2 + (0,004)^2(0,052)^2} \\
 &= 0,0002 \\
 p\text{-value} &= \frac{a2b}{sa2b} \\
 &= \frac{(1,249 \times 10^{-10}) \times (-1,589 \times 10^{-9})}{0,0002} \\
 &= -9,92331 \times 10^{-16}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji sobel di atas sehingga diketahuilah nilai signifikansi pengaruh pada ketiga jalur tersebut yang dapat disimpulkan bahwa:

**Tabel 6.** Hasil Uji Sobel

Hubungan Tidak Langsung	P-value	Keterangan
RP → RB → GR	$-3,99483 \times 10^{-16}$	Berpengaruh
RI → RB → GR	$-9,92331 \times 10^{-16}$	Berpengaruh

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Sobel

Hasil pengaruh mediasi jalur pertama menunjukkan angka sebesar  $-3,99483 \times 10^{-16}$  yang mana lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi sebesar 0,05 sehingga jalur pertama berpengaruh. Begitu juga dengan hasil pengaruh mediasi jalur kedua yang menunjukkan angka sebesar  $-9,92331 \times 10^{-16}$  lebih kecil dibandingkan 0,05 sehingga jalur kedua juga berpengaruh. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa jalur

pertama mediasi menghasilkan pengaruh mediasi yang negatif begitu juga pada jalur kedua mediasi menghasilkan pengaruh mediasi yang negatif.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Realisasi Pendapatan Terhadap Realisasi Belanja**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa realisasi pendapatan (RP) berpengaruh positif terhadap realisasi belanja (RB). Hasil tersebut dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05 serta nilai  $T_{hitung}$  sebesar 29,332 lebih besar dari nilai  $T_{tabel}$  sebesar 1,996. Maka dapat diambil keputusan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya realisasi pendapatan berpengaruh terhadap realisasi belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan dengan nilai *Standard Coefficient Beta* sebesar 0,950. Dari koefisien tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja adalah positif. Artinya setiap kenaikan realisasi pendapatan sebesar 1 ribu rupiah maka akan meningkatkan realisasi belanja sebesar 0,950 ribu rupiah.

Berdasarkan teori fiskal yang dinyatakan oleh Keynes realisasi pendapatan berpengaruh positif terhadap realisasi belanja. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan pemerintah dan realisasi belanja pemerintah saling mempengaruhi dan memiliki hubungan yang kompleks dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Realisasi pendapatan pemerintah dapat mempengaruhi realisasi belanja pemerintah karena semakin besar pendapatan pemerintah maka semakin besar pula sumber daya yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan pengeluaran atau belanja pemerintah. Saat realisasi pendapatan pemerintah meningkat, maka pemerintah akan memiliki lebih banyak sumber daya keuangan untuk melakukan membiayai kegiatan dan proyek yang diperlukan. Oleh karena itu, realisasi belanja pemerintah pun akan cenderung meningkat.

Dalam hal ini, pemerintah akan menggunakan pendapatan yang lebih tinggi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, program sosial, dan lain-lain. Semua program ini akan membutuhkan anggaran yang lebih besar, dan kenaikan pendapatan akan memberikan ruang untuk pemerintah untuk meningkatkan belanja di sektor-sektor tersebut. Dengan demikian, meningkatnya realisasi pendapatan pemerintah dan belanja pemerintah memiliki kaitan yang erat. Selain itu, realisasi pendapatan yang meningkat juga dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah, sehingga pemerintah memiliki fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar dalam menjalankan kebijakannya. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan realisasi belanja pada sektor-sektor yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati *et al* (2017), Fatimah *et al* (2019), dan Arifah *et al* (2019) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah

### **Pengaruh Realisasi Investasi Terhadap Realisasi Belanja**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa realisasi investasi (RI) berpengaruh positif terhadap realisasi belanja (RB). Hasil tersebut dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,026 yang dimana lebih kecil dari 0,05 serta nilai  $T_{hitung}$  sebesar 2,282 lebih besar dari nilai  $T_{tabel}$  sebesar 1,996. Maka dapat diambil keputusan  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima, artinya realisasi investasi berpengaruh terhadap realisasi belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan dengan nilai *Standard Coefficient Beta* sebesar 0,074. Dari koefisien tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh realisasi investasi terhadap realisasi belanja adalah positif. Artinya setiap kenaikan realisasi investasi sebesar 1 ribu rupiah maka akan meningkatkan realisasi belanja sebesar 0,074 ribu rupiah.

Berdasarkan teori fiskal yang dinyatakan oleh Keynes realisasi investasi berpengaruh positif terhadap realisasi belanja. Pengaruh positif secara langsung realisasi investasi terhadap realisasi belanja pemerintah dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah dengan banyaknya proyek-proyek investasi yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek investasi tersebut, sehingga belanja pemerintah akan meningkat seiring dengan meningkatnya realisasi investasi. Sehingga semakin banyaknya proyek maka realisasi investasi juga semakin besar dan realisasi belanja akan meningkat untuk membelanjakan proyek tersebut.

Selain itu investasi yang dilakukan oleh pihak swasta juga dapat memicu peningkatan belanja pemerintah, terutama pada sektor-sektor tertentu seperti infrastruktur. Misalnya, ketika ada investor yang membangun sebuah pabrik, maka pemerintah perlu membangun jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya agar pabrik tersebut dapat diakses dengan mudah. Hal ini akan memicu peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Dalam keseluruhan, peningkatan investasi dapat memicu peningkatan belanja pemerintah melalui berbagai mekanisme. Namun, hal ini juga dapat bergantung pada kebijakan dan strategi investasi yang diterapkan oleh pemerintah serta efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana yang ada. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ifrizal *et al* (2014) yang menemukan bahwa investasi memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja pemerintah.

### **Pengaruh Realisasi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa realisasi pendapatan (RP) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (GR). Hasil tersebut dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,738 yang mana lebih besar daripada  $\alpha$  yaitu sebesar 0,05 dan nilai  $T_{hitung}$  sebesar 0,336 lebih kecil daripada nilai  $T_{tabel}$  sebesar 1,996 sehingga realisasi pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Maka dapat diambil keputusan  $H_0$ .



diterima dan  $H_3$  ditolak, artinya realisasi pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan teori desentralisasi pembangunan, realisasi pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam penelitian ini realisasi pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, meningkatnya pendapatan pemerintah dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, terutama jika pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai program-program pembangunan yang dapat mendorong investasi, meningkatkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Namun, jika pemerintah tidak mengelola pendapatan tersebut dengan baik, maka dapat terjadi beberapa faktor yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, satu diantaranya adalah kebijakan fiskal yang tidak tepat. Pemerintah mungkin mengambil kebijakan fiskal yang tidak tepat, seperti menaikkan tarif pajak yang terlalu tinggi atau memperketat pengeluaran pemerintah dalam jumlah besar. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi, dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, inflasi juga dapat menjadi faktor penyebab pertumbuhan ekonomi menurun saat pendapatan pemerintah meningkat. Jika pendapatan pemerintah meningkat terlalu cepat, terutama melalui pinjaman dari bank sentral, maka hal ini dapat menyebabkan inflasi. Inflasi yang tinggi dapat membuat biaya produksi meningkat dan mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola pendapatan dengan baik dan tepat sasaran agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tahar *et al* (2011) yang meneliti mengenai pengaruh pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **Pengaruh Realisasi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa realisasi investasi (RI) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (GR). Hasil tersebut dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,027 yang dimana lebih kecil dari 0,05 serta nilai  $T_{hitung}$  sebesar 2,264 lebih besar dari nilai  $T_{tabel}$  sebesar 1,996. Maka dapat diambil keputusan  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, artinya realisasi investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan dengan nilai *Standard Coefficient Beta* sebesar 0,283. Dari koefisien tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh realisasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. Artinya setiap kenaikan realisasi investasi sebesar 1 ribu rupiah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 28,3%.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi endogen realisasi investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika investasi pemerintah meningkat, hal ini akan meningkatkan produksi dan aktivitas ekonomi di sektor-sektor yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. Misalnya, jika pemerintah menginvestasikan dana untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bandara, maka akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas barang dan jasa. Hal ini akan memicu

peningkatan permintaan dan penawaran barang dan jasa, yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan masyarakat secara umum.

Selain itu, investasi pemerintah juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama di sektor-sektor yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. Dengan adanya lapangan kerja baru, maka masyarakat akan memiliki penghasilan yang lebih baik, sehingga akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dalam jangka panjang, investasi pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan pengembangan sektor ekonomi yang baru.

Namun, investasi pemerintah juga harus dilakukan dengan bijaksana dan efektif agar dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Jika investasi tidak tepat sasaran atau terjadi penyelewengan dana, maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwandika *et al* (2015), Kambono *et al* (2020), dan Purba (2020) dimana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa investasi pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **Pengaruh Realisasi Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa realisasi belanja (RB) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (GR). Hasil tersebut dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,554 yang mana lebih besar daripada  $\alpha$  yaitu sebesar 0,05 dan nilai  $T_{hitung}$  sebesar -0,594 lebih kecil daripada nilai  $T_{tabel}$  sebesar 1,996 sehingga realisasi belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Maka dapat diambil keputusan  $H_0$  diterima dan  $H_5$  ditolak, artinya realisasi belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Hukum Wagner realisasi belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam penelitian ini realisasi belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini, satu diantaranya adalah karena inefisiensi dalam pengelolaan belanja pemerintah. Jika belanja pemerintah tidak dikelola dengan efisien dan efektif, maka dapat terjadi pemborosan anggaran dan kegiatan yang tidak produktif. Hal ini akan mengurangi efek positif dari peningkatan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, realisasi belanja pemerintah lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai sehingga tidak menunjang pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Peningkatan belanja pemerintah juga dapat menimbulkan inflasi. Jika peningkatan belanja pemerintah tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa di masyarakat, maka akan terjadi kenaikan harga, yang dikenal sebagai inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan atas barang dan jasa dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa belanja pemerintah dikelola secara efisien dan efektif, dan diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa di masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam

agar peningkatan belanja pemerintah dapat turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini *et al* (2019) yang meneliti mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan menemukan hasil bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh.

#### **Pengaruh Tidak Langsung Realisasi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat Melalui Variabel Intervening Realisasi Belanja**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, bahwa terdapat pengaruh langsung antara realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja, kemudian realisasi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terdapat pengaruh dan berdasarkan hasil uji sobel didapat nilai *p-value* sebesar  $-3,99483 \times 10^{-16}$  yang mana lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 sehingga realisasi belanja memediasi antara realisasi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien jalur tidak langsung pada jalur pertama sebesar -0,2565 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisien jalur secara langsung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,150. Hal ini berarti bahwa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berdampak negatif daripada secara langsung.

Dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif secara tidak langsung diantara realisasi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui realisasi belanja sebesar -0,2565. Setiap kenaikan realisasi pendapatan sebesar 1 ribu rupiah secara tidak langsung melalui realisasi belanja maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2565 persen sehingga semakin menurun persentase pertumbuhan ekonomi yang ada. Dengan memasukkan variabel mediasi semakin mengurangi menambah pengaruh negatif antara realisasi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut secara otomatis  $H_0$  diterima dan  $H_6$  ditolak, hipotesis yang dikemukakan oleh penulis bahwa realisasi pendapatan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat melalui variabel intervening realisasi belanja ditolak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara pendapatan dan belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga meskipun pendapatan dan belanja pemerintah meningkat, pertumbuhan ekonomi justru menurun. Ketika realisasi pendapatan meningkat, pemerintah merasa terdorong untuk meningkatkan belanja pemerintah. Dalam teori Desentralisasi Pembangunan, umumnya diasumsikan bahwa desentralisasi yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, jika pengeluaran ini tidak diimbangi dengan sumber daya yang cukup, seperti pajak yang mencukupi, maka pemerintah mungkin harus meminjam uang untuk membiayai belanja pemerintah tersebut. Ini bisa meningkatkan utang pemerintah dan memicu inflasi yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif.

Selain itu, realisasi pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer. Porsi pendapatan transfer yang cukup besar menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pusat masih tinggi. Sehingga meningkatnya realisasi pendapatan masih belum bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang tidak efektif juga dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan penurunan kualitas layanan publik, yang pada gilirannya dapat merugikan

pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara realisasi pendapatan dan belanja pemerintah dengan cara yang memungkinkan untuk pengeluaran yang berkelanjutan dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi.

### **Pengaruh Tidak Langsung Realisasi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat Melalui Variabel Intervening Realisasi Belanja**

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, bahwa terdapat pengaruh langsung antara realisasi investasi terhadap realisasi belanja, kemudian realisasi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terdapat pengaruh dan berdasarkan hasil uji sobel didapat nilai *p-value* sebesar  $-9,92331 \times 10^{-16}$  yang mana lebih kecil dari taraf signifikan sebesar 0,05 sehingga realisasi belanja memediasi antara realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien jalur tidak langsung pada jalur kedua sebesar -0,02 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisien jalur secara langsung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,283. Hal ini berarti bahwa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berdampak negatif daripada secara langsung. Dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif secara tidak langsung diantara realisasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui realisasi belanja sebesar -0,02. Setiap kenaikan realisasi investasi sebesar 1 ribu rupiah secara tidak langsung melalui realisasi belanja maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 persen sehingga semakin menurun persentase pertumbuhan ekonomi yang ada. Dengan memasukkan variabel mediasi semakin menambah pengaruh negatif antara realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut secara otomatis  $H_0$  diterima dan  $H_7$  ditolak, hipotesis yang dikemukakan oleh penulis bahwa realisasi investasi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat melalui variabel intervening realisasi belanja ditolak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa disaat investasi dan belanja pemerintah meningkat, pertumbuhan ekonomi bisa menurun. Satu diantaranya adalah karena *overheating* ekonomi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen, terdapat kemungkinan terjadinya fenomena *overheating* ekonomi ketika realisasi investasi berlebihan. *Overheating* ekonomi terjadi ketika tingkat investasi melebihi tingkat yang optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika perekonomian sedang mengalami *overheating* atau kelebihan permintaan, peningkatan investasi dan belanja pemerintah yang lebih lanjut dapat menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu kebijakan fiskal yang tidak efektif juga dapat menjadi faktor penyebabnya. Jika kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah tidak efektif atau tidak tepat sasaran, maka hal tersebut dapat mengakibatkan inflasi yang tinggi dan melemahkan daya beli masyarakat serta menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Masalah seperti korupsi dan ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran juga dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi investasi dan belanja pemerintah serta memperparah situasi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan

perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kebijakan fiskal untuk memastikan peningkatan investasi dan belanja pemerintah dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan data dan hasil perhitungan estimasi model yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pada hasil analisis jalur realisasi pendapatan berpengaruh positif terhadap realisasi belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien realisasi pendapatan sebesar 0,950.
2. Pada hasil analisis jalur realisasi investasi berpengaruh positif terhadap realisasi belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien realisasi investasi sebesar 0,074.
3. Pada hasil analisis jalur realisasi pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021. Kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat menyebabkan realisasi pendapatan meningkat namun pertumbuhan ekonomi menurun.
4. Pada hasil analisis jalur realisasi investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien realisasi investasi sebesar 0,283.
5. Pada hasil analisis jalur realisasi belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021. Karena sebagian besar realisasi belanja digunakan untuk belanja pegawai, sehingga tidak menunjang pertumbuhan ekonomi.
6. Pada hasil analisis jalur realisasi pendapatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimediasi oleh variabel realisasi belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021.
7. Pada hasil analisis jalur realisasi investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimediasi oleh variabel realisasi belanja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021.

## **Saran**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga masih perlu untuk disempurnakan. Berdasarkan hasil dan kesimpulan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan agar mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu diharapkan pemerintah dapat mengelola pendapatan dan belanja dengan baik dan efektif agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat. Korupsi dan ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi investasi dan belanja pemerintah serta memperparah situasi tersebut. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kebijakan fiskal untuk memastikan

peningkatan investasi dan belanja pemerintah dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

### **Batasan**

Penelitian ini hanya dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar jumlah data diperbanyak dengan melibatkan seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kualitas hasil penelitian.

### **REFERENSI**

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifah, N. A., & Haryanto, H. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap investasi swasta di indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 28-38.
- Azzumar, M. R., & Handayani, H. R. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Skripsi.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2017-2021. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Realisasi Belanja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2017-2021. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2017-2021. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Realisasi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2017-2021. Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2022). Bangkit Dan Optimis: Sinergi Dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi. *Bank Indonesia*.
- Fahlevi, M. F., & Gunawan, E. (2016). Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Social Capital Terhadap PDRB di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*. 1(1), 88-95.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Equity*, 22(2), 197-214.
- Fitria, A., Weriantoni, W., Saibah, B. R. A. M., & Sufiawan, N. A. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 46-53.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Ginting, G. (2021). *Investasi dan Struktur Modal*. Jakarta: CV. Azka Pustaka.
- Harahap, Sofyan S. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hussain, M.E., & Haque, M. (2016). Foreign Direct Investment, Trade, and Economic Growth : An Empirical Analysis of Bangladesh. *Economies*, 4 (7).
- Ifrizal, D & Sulaiman. (2014). Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya Pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2).
- Jufrida, F., Syechalad, M.N., & Nasir, M. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Langsung (FDI) dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1).
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137-145.
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2017). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Inovasi*, 13(2), 68-77.
- Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1).
- Mardiasmo. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mikesell, J. L. (2020). *Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector (10th ed.)*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Prastomo, I. W. A. (2017). Dampak Penanaman Modal Asing terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia: Crowding In atau Crowding Out?. Skripsi.
- Purba, B. (2020). Analisis Tentang Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(1), 196-204.
- Raharjo, A. (2006). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 1982-2003 (Studi Kasus di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Razak, A., Riyani, Y., Mardiah, K., Riyadhi, B., Arianto, & Kurniasih, N. (2020). *Buku Pedoman Tugas Akhir*. Pontianak: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas
- Republik Indonesia. (2007). *Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Legalitas.



- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85-96.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sukirno, Sadono. (2005). *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwandika, P. E., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(7), 794-810.
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran pemerintah dan perkembangan perekonomian (Hukum Wagner) di negara sedang berkembang: Tinjauan sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65-89.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(1), 88-99.
- Wati, M. R. & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah kota bandung. *Jurnal kajian akuntansi*, 1(1).
- Weston J.Fred dan Copeland E.Thomas. (2004). *Manajemen Keuangan*. Edisi Sembilan. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Yuliana, E. S., Rukmi, M. P., Mustafa, B., & Ananta, V. (2021). Pendapatan Pemerintah Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi-[SNAV]*, 9(1), 137-149.